Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (1) 2026, Page: 1613-1618

Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pengawasan Dprd Kota Palembang Di Kecamatan Kemuning Dalam Menangani Isu Pelayanan Publik

Muhammad Alzena Akbar[1] R.A. Julia Pratiwi[2] Rina Pebriana[3]
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Jl.Prof.K.H.Zainal Abidin Fikri. No 1, Pahlawan, Kec, Kemuning, Kota Palembang
Sumatera Selatan 30126
Email alzenaakbar1205@gmail.com, rajulia1233@gmail.com[2]

Published: Januari, 2026

ABSTRACT

This study aims to determine public perceptions of the oversight performance of the Palembang City Regional Representative Council (DPRD) in Kemuning District in addressing public service issues. The DPRD, as a regional legislative body, plays a strategic role in absorbing public aspirations, overseeing local government policies, and ensuring that public services meet citizen needs. However, in practice, various public complaints persist regarding transparency, responsiveness, and the follow-up of public aspirations.

This study used a qualitative approach using in-depth interviews with residents of Kemuning District aged 17 and over. The data obtained were analyzed using thematic analysis techniques to identify patterns of meaning that emerged from the experiences and perspectives of informants. The analysis revealed several key themes shaping public perceptions: transparency of DPRD performance, level of public trust, effectiveness of recess as a means of gathering aspirations, oversight of public services and development projects, and handling of employment issues.

The discussion of the research findings is linked to Agenda-Setting Theory to understand how frequently raised and discussed issues influence assessments of DPRD performance. Research findings indicate that low transparency and weak follow-up of aspirations have led some members of the public to hold negative perceptions of the DPRD's oversight performance. Therefore, increasing transparency, open communication, and strengthening the oversight function are crucial steps in building public trust and improving the quality of public services in Palembang City.

Keywords: *Public Perception, DPRD Performance, DPRD Oversight, Public Services, Agenda Setting, Regional Government*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kinerja pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang di Kecamatan Kemuning dalam menangani isu pelayanan publik. DPRD sebagai lembaga legislatif daerah memiliki peran strategis dalam menyerap aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah, serta memastikan pelayanan publik berjalan sesuai dengan kebutuhan warga. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai keluhan masyarakat yang berkaitan dengan transparansi, responsivitas, dan tindak lanjut aspirasi publik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap masyarakat Kecamatan Kemuning yang berusia 17 tahun ke atas. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola makna yang muncul dari pengalaman dan pandangan informan. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa tema utama yang membentuk persepsi masyarakat, yaitu transparansi kinerja DPRD, tingkat kepercayaan publik, efektivitas reses sebagai sarana penyerapan aspirasi, pengawasan terhadap pelayanan publik dan proyek pembangunan, serta penanganan isu ketenagakerjaan.

Pembahasan hasil penelitian dikaitkan dengan Agenda-Setting Theory untuk memahami bagaimana isu-isu yang sering muncul dan dibicarakan dalam masyarakat memengaruhi penilaian terhadap kinerja DPRD. Temuan penelitian menunjukkan bahwa rendahnya transparansi dan lemahnya tindak lanjut aspirasi menyebabkan sebagian masyarakat memiliki persepsi negatif terhadap kinerja pengawasan DPRD. Oleh karena itu, peningkatan transparansi, komunikasi yang terbuka, serta penguatan fungsi pengawasan menjadi langkah penting dalam membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Palembang.

Kata Kunci : *Persepsi Masyarakat, Kinerja DPRD, Pengawasan DPRD, Pelayanan Publik, Agenda Setting, Pemerintahan Daerah*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Penelitian mengenai sudut pandang masyarakat terhadap performa DPRD di Palembang berawal dari kebutuhan untuk memahami bagaimana masyarakat menilai kinerja legislatif daerah dalam konteks permasalahan lokal. DPRD Kota Palembang merupakan lembaga yang memiliki peran strategis sebagai penyambung aspirasi rakyat, penyusun kebijakan melalui legislasi, serta pengawas jalannya pemerintahan. Tanggung jawab tersebut mencakup berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pengelolaan pajak daerah, serta peningkatan kesejahteraan sosial. Namun, dalam praktiknya, masyarakat sering menyampaikan keluhan dan kritik yang menggambarkan adanya ketidakpuasan terhadap kinerja DPRD, baik terkait dengan efektivitas legislasi maupun responsivitas terhadap aspirasi publik.

Dalam berbagai forum resmi seperti rapat paripurna, pembahasan Raperda, serta kegiatan reses, seluruh fraksi DPRD Palembang menunjukkan bahwa mereka memperhatikan masukan dari masyarakat sebagai bahan pertimbangan kebijakan pembangunan daerah. Akan tetapi, persepsi masyarakat terhadap kinerja DPRD seringkali dipengaruhi oleh berbagai isu negatif, seperti keterlambatan pengesahan peraturan daerah, minimnya kehadiran anggota dalam rapat, hingga anggapan bahwa wakil rakyat kurang tanggap terhadap kebutuhan riil di lapangan. Kondisi inilah yang membuat pentingnya mengkaji lebih dalam perspektif masyarakat mengenai kiprah DPRD Palembang untuk memberikan gambaran objektif terhadap kinerja dan citra lembaga legislatif daerah tersebut. (Wahyudi, A. 2018).

Fenomena yang muncul adalah adanya ketidaksesuaian antara pernyataan formal DPRD mengenai penerimaan aspirasi publik dengan persepsi masyarakat yang merasa bahwa kinerja legislator belum optimal. Masyarakat menilai produktivitas legislasi masih rendah, penyelesaian peraturan daerah sering tertunda, dan respons anggota dewan terhadap keluhan publik tidak selalu memuaskan. Sementara itu, DPRD menegaskan bahwa mereka telah menjalankan tugas konstitusional melalui rapat paripurna, reses, dan berbagai kegiatan pembahasan kebijakan. Fenomena perbedaan persepsi inilah yang menjadi fokus utama penelitian. fenomena ini penting dikaji karena kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif sangat berpengaruh terhadap legitimasi pemerintahan daerah. DPRD sebagai representasi rakyat seharusnya menjadi saluran utama aspirasi dan kebutuhan masyarakat (Rahmawati,S 2020). Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan atau muncul ketidakpuasan yang berkelanjutan, maka efektivitas pemerintahan dapat terganggu, termasuk kualitas kebijakan dan stabilitas politik lokal. Selain itu, kajian mengenai persepsi publik dapat memberikan masukan bagi pembaruan kebijakan, peningkatan transparansi, serta perbaikan kinerja DPRD Palembang

Kota Palembang merupakan kota besar dengan karakter masyarakat urban yang semakin kritis, terhubung dengan media digital, dan aktif menyuarakan pendapat mengenai kebijakan pemerintah. Budaya lokal yang terbuka, ditambah dengan akses informasi yang semakin mudah, membuat masyarakat mampu menilai secara langsung kinerja lembaga pemerintahan. Dalam konteks ini, DPRD Palembang memiliki tantangan untuk menjaga kepercayaan publik melalui komunikasi politik yang efektif, kehadiran dalam kegiatan reses, dan pengambilan keputusan yang berpihak pada masyarakat. Situasi lapangan juga memperlihatkan adanya perbedaan kebutuhan antara masyarakat pusat kota dan masyarakat kawasan pinggiran yang sering merasa kurang terwakili. Wahyono, T. (2017).

Sejauh ini, banyak penelitian mengenai kinerja DPRD di berbagai daerah cenderung fokus pada evaluasi internal lembaga, produktivitas legislasi, atau analisis kelembagaan. Namun, penelitian yang secara khusus menggali persepsi masyarakat Palembang terhadap kinerja DPRD dalam kaitannya dengan isu-isu yang pernah terjadi masih terbatas. Sebagian kajian bersifat umum dan tidak mengupas secara mendalam bagaimana masyarakat menilai kualitas respons DPRD terhadap permasalahan lokal seperti infrastruktur, pajak daerah, dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut melalui sudut pandang masyarakat sebagai aktor penerima dampak langsung dari kebijakan DPRD. Firmansyah, M. (2019).

Kasus-kasus seperti proyek pokir yang tidak jelas dan masalah korupsi menunjukkan adanya masalah kepercayaan dan integritas terhadap DPRD. Hal ini penting jika Anda ingin menyelidiki bagaimana pandangan publik mengenai transparansi dan akuntabilitas legislatif. Sumber: dandapala.com

Banyaknya pengaduan masyarakat melalui reses atau aksi protes nyata (seperti masalah banjir, saluran yang buruk, jalan yang rusak, dan lampu jalan yang mati) menunjukkan bahwa meskipun DPRD sering melakukan reses atau pertemuan, ada kesan bahwa suara masyarakat sering kali tidak ditindaklanjuti dengan baik. Ini relevan untuk penelitian Anda tentang seberapa responsif dan efektif DPRD dalam merespons aspirasi publik. Sumber:sumselpers.com

Kasus-kasus terkait ketenagakerjaan atau pengaduan mengenai dokumen pribadi (seperti ijazah yang ditahan) memperluas cakupan isu yang ada, bukan hanya terbatas pada infrastruktur, tetapi juga mencakup keadilan sosial dan fungsi advokasi DPRD bagi masyarakat. Sumber: detikcom

Informasi dan berita ini memberikan bukti konkret yang dapat mendukung argumen bahwa pandangan masyarakat terhadap DPRD dipengaruhi oleh kondisi di lapangan, bukan hanya oleh pernyataan resmi dari DPRD.

METODE PENELITIAN

Bagian Penelitian yang dilakukan menggunakan metode wawancara dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini sendiri umumnya digunakan pada fenomenologi sosial (Saparudin et al.,2020), penelitian yang berkaitan dengan pertanyaan siapa, apa, dimana, dan bagaimana atas suatu peristiwa atau pengalaman yang akan dikaji lebih mendalam untuk menentukan suatu skema peristiwa secara deskriptif (Putri et al., 2021).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai persepsi masyarakat terhadap kinerja dan citra DPRD Kota Palembang. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, pengalaman, serta interpretasi masyarakat secara lebih komprehensif dalam konteks sosial-politik yang mereka hadapi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan masyarakat berusia 17 tahun ke atas, yaitu kelompok yang telah memiliki kemampuan menilai dan memberikan pandangan kritis terhadap performa lembaga legislatif daerah. Selain itu, observasi lapangan juga dimanfaatkan untuk menangkap dinamika interaksi masyarakat dengan isu-isu politik lokal, termasuk bagaimana mereka merespons informasi mengenai aktivitas DPRD yang beredar di lingkungan sosial.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yaitu proses mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menafsirkan pola-pola makna dalam jawaban informan. Dalam tahap ini, peneliti menelaah bagaimana isu-isu tertentu yang berkaitan dengan DPRD muncul, diulang, atau dianggap penting oleh masyarakat. Analisis tersebut kemudian dihubungkan dengan Agenda-Setting Theory, yang menjadi landasan teoretis penelitian ini. Teori tersebut membantu peneliti memahami bagaimana fokus perhatian publik terbentuk melalui pemberitaan media, percakapan sosial, maupun pernyataan aktor politik, dan bagaimana hal itu memengaruhi penilaian masyarakat terhadap kinerja DPRD. Dengan menggabungkan hasil wawancara, observasi, dan analisis teoretis, penelitian ini berupaya memberikan gambaran menyeluruh mengenai faktor-faktor yang membentuk persepsi publik serta relevansi kinerja DPRD dengan kebutuhan dan harapan warga Palembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Data penelitian ini dianalisis menggunakan analisis tematik sebagaimana dikemukakan oleh Braun dan Clarke (2021), dengan menelaah secara mendalam seluruh jawaban informan untuk menemukan pola-pola makna yang berulang dan dianggap penting oleh masyarakat. Proses analisis dimulai dari pembacaan menyeluruh data, pengkodean awal, hingga pengelompokan tema-tema utama yang merepresentasikan persepsi masyarakat Kecamatan Kemuning terhadap kinerja pengawasan DPRD Kota Palembang dalam menangani isu pelayanan publik. Data dikumpulkan melalui pendapat masyarakat yang mencerminkan pengalaman nyata, penilaian pribadi, serta ekspektasi warga terhadap peran DPRD sebagai lembaga yang mewakili mereka.

Tema pertama yang paling dominan adalah **transparansi kinerja DPRD**. Informan menilai bahwa informasi terkait pokok-pokok pikiran (pokir) dan hasil pengawasan DPRD belum disampaikan secara terbuka dan mudah dipahami oleh masyarakat. Kondisi ini menyebabkan masyarakat kesulitan mengetahui proses perencanaan hingga realisasi program. Salah satu informan menyatakan bahwa "informasi tentang pokir masih belum jelas, masyarakat tidak tahu program itu sudah berjalan sejauh

apa". Temuan ini sejalan dengan pandangan Hidayat dan Pratama (2021) yang menyebutkan bahwa rendahnya transparansi DPRD berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan publik.

Tema kedua berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap DPRD. Kepercayaan publik dinilai sangat dipengaruhi oleh intensitas kehadiran anggota DPRD di tengah masyarakat serta konsistensi antara janji dan tindakan. Informan menilai bahwa kepercayaan akan meningkat apabila anggota DPRD aktif turun ke lapangan dan mendengarkan aspirasi warga secara langsung. Sebaliknya, minimnya kehadiran dan lambatnya respons terhadap keluhan masyarakat memicu penurunan kepercayaan. Hal ini sejalan dengan temuan Widianingsih dan Morrell (2019) yang menegaskan bahwa kualitas interaksi antara legislatif dan masyarakat memengaruhi legitimasi lembaga perwakilan.

Tema ketiga adalah penyerapan dan tindak lanjut aspirasi masyarakat melalui reses. Reses dipandang sebagai sarana yang cukup efektif untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Namun, sebagian besar informan menilai bahwa tindak lanjut dari aspirasi tersebut belum jelas dan terukur. Aspirasi yang telah disampaikan sering kali tidak disertai informasi lanjutan mengenai realisasi. Salah satu informan menyampaikan bahwa "aspirasi saat reses memang dicatat, tetapi setelah itu tidak ada kabar lanjutan"(wawancara November 2025) . Temuan ini mendukung hasil penelitian Sari dan Putra (2020) yang menyatakan bahwa lemahnya tindak lanjut aspirasi menjadi sumber utama persepsi negatif masyarakat terhadap kinerja DPRD.

Tema keempat yang muncul adalah pengawasan terhadap pelayanan publik dan proyek pembangunan. Informan menilai bahwa DPRD belum maksimal dalam melakukan pengawasan pasca pelaksanaan proyek. Akibatnya, permasalahan yang sama terus berulang dari tahun ke tahun, seperti pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu informan menyebutkan bahwa "banyak pembangunan tidak memperhatikan saluran air, sehingga justru menimbulkan masalah baru". Kondisi ini memperkuat temuan Fadli dan Yuliani (2022) yang menyatakan bahwa lemahnya pengawasan DPRD berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan publik daerah.

Tema kelima berkaitan dengan penanganan isu ketenagakerjaan. Meskipun tidak semua informan memiliki pengalaman langsung, isu ini tetap muncul dalam persepsi masyarakat. DPRD dinilai belum cukup cepat dan tegas dalam menindaklanjuti pengaduan terkait hak-hak pekerja. Informan menilai bahwa laporan memang diterima, namun proses penyelesaiannya berjalan lambat dan hasil akhirnya tidak selalu diketahui masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa isu perlindungan pekerja belum menjadi agenda prioritas DPRD.

PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tema-tema yang muncul dari hasil analisis tematik merupakan isu-isu yang dianggap penting oleh masyarakat dalam menilai kinerja pengawasan DPRD. Hal ini sejalan dengan Agenda-Setting Theory yang menyatakan bahwa isu yang sering muncul dan mendapat perhatian publik akan membentuk persepsi masyarakat terhadap suatu lembaga atau kebijakan (McCombs, 2018).

Dalam konteks penelitian ini, transparansi, kepercayaan, dan tindak lanjut aspirasi menjadi agenda utama dalam persepsi masyarakat Kecamatan Kemuning. Minimnya informasi yang disampaikan DPRD mengenai hasil pengawasan dan realisasi aspirasi menyebabkan masyarakat membangun penilaian berdasarkan pengalaman pribadi dan informasi yang beredar di ruang publik. Ketika isu kurangnya transparansi dan lambatnya respons DPRD lebih sering muncul, maka isu tersebut menjadi dominan dalam membentuk persepsi publik.

Agenda setting tingkat lanjutan juga terlihat dari cara masyarakat menilai atribut kinerja DPRD, seperti responsivitas dan keterbukaan. Publik tidak hanya menilai isu apa yang dianggap penting, tetapi juga bagaimana isu tersebut dikelola oleh aktor politik (Guo & McCombs, 2016). Meskipun DPRD telah melaksanakan kegiatan formal seperti reses, pelaksanaannya dinilai belum memenuhi harapan masyarakat karena tidak disertai dengan hasil yang nyata.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Kecamatan Kemuning terhadap kinerja pengawasan DPRD Kota Palembang sangat dipengaruhi oleh proses agenda setting. Oleh karena itu, peningkatan transparansi, komunikasi yang terbuka, serta tindak lanjut

aspirasi yang jelas dan terukur menjadi langkah penting bagi DPRD dalam meningkatkan kepercayaan dan persepsi positif masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di Kecamatan Kemuning, dapat dipahami bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja pengawasan DPRD Kota Palembang terbentuk dari pengalaman langsung mereka dalam menyampaikan aspirasi serta mengamati tindak lanjut kebijakan publik. Informan secara konsisten mengemukakan bahwa keterbukaan informasi, kejelasan tindak lanjut aspirasi, dan efektivitas pengawasan masih dirasakan belum optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menilai DPRD dari keberadaan kegiatan formal, tetapi dari sejauh mana kegiatan tersebut menghasilkan perubahan nyata bagi kehidupan publik.

Jika dianalisis melalui *Agenda-Setting Theory*, kondisi ini menggambarkan bagaimana isu-isu tertentu menjadi dominan dalam membentuk penilaian masyarakat. McCombs (2018) menjelaskan bahwa isu yang paling sering muncul dan diperbincangkan akan dianggap penting oleh publik. Dalam penelitian ini, isu seperti keterlambatan realisasi aspirasi, lemahnya pengawasan proyek pembangunan, dan minimnya informasi hasil kerja DPRD menjadi agenda utama yang membentuk persepsi masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan Guo dan McCombs (2016) yang menyatakan bahwa agenda setting tidak hanya memengaruhi apa yang dipikirkan masyarakat, tetapi juga bagaimana masyarakat menilai kualitas kinerja suatu institusi.

Peneliti berargumen bahwa meskipun DPRD telah melaksanakan fungsi formal seperti reses dan rapat pengawasan, kegiatan tersebut belum sepenuhnya membentuk agenda positif di mata masyarakat karena kurangnya transparansi hasil dan komunikasi lanjutan. Hidayat dan Pratama (2021) menegaskan bahwa transparansi merupakan faktor kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif daerah. Ketika masyarakat tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai proses dan hasil pengawasan, maka persepsi negatif lebih mudah terbentuk meskipun aktivitas kelembagaan tetap berjalan.

Lebih lanjut, hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat menilai kinerja DPRD melalui atribut seperti responsivitas, konsistensi, dan komitmen dalam memperjuangkan aspirasi warga. Hal ini mencerminkan agenda setting tingkat kedua, di mana publik tidak hanya memperhatikan isu, tetapi juga menilai cara isu tersebut dikelola oleh aktor politik (Widianingsih & Morrell, 2019). Lemahnya pengawasan terhadap pelayanan publik dan proyek pembangunan sebagaimana disampaikan informan mengindikasikan bahwa fungsi kontrol DPRD terhadap eksekutif belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Kondisi ini selaras dengan penelitian Fadli dan Yuliani (2022) yang menyatakan bahwa lemahnya fungsi pengawasan legislatif berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan publik daerah.

Dalam konteks isu ketenagakerjaan, informan menilai bahwa DPRD belum menunjukkan respons yang cepat dan tegas dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Peneliti memandang bahwa hal ini mencerminkan belum maksimalnya fungsi advokasi DPRD terhadap kelompok masyarakat yang rentan. Dwiyanto (2018) menekankan bahwa lembaga perwakilan rakyat memiliki peran strategis tidak hanya dalam pembentukan kebijakan, tetapi juga dalam memastikan perlindungan hak-hak warga melalui pengawasan yang berkeadilan.

Dengan demikian, analisis ini menegaskan bahwa persepsi masyarakat Kecamatan Kemuning terhadap kinerja pengawasan DPRD Kota Palembang merupakan hasil dari interaksi antara pengalaman empiris masyarakat, dominasi isu dalam agenda publik, serta lemahnya komunikasi dan tindak lanjut kebijakan. Peneliti berpendapat bahwa perbaikan kinerja DPRD perlu diiringi dengan penguatan transparansi, pelaporan hasil pengawasan yang mudah diakses, serta mekanisme tindak lanjut aspirasi yang jelas dan terukur. Upaya tersebut penting untuk menyelaraskan agenda DPRD dengan agenda publik sehingga dapat membangun kepercayaan dan meningkatkan legitimasi lembaga legislatif daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic Analysis: A Practical Guide*. SAGE Publications.

Dwiyanto, A. (2018). *Manajemen Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press.

Fadli, M., & Yuliani, S. (2022). Kinerja pengawasan DPRD terhadap pelayanan publik daerah. *Jurnal Politik Pemerintahan*, 14(1), 33–47.

Guo, L., & McCombs, M. (2016). Toward the third level of agenda setting theory. *Journal of Communication*, 66(4), 650–672.

Hidayat, R., & Pratama, A. (2021). Transparansi DPRD dan kepercayaan publik di daerah. *Jurnal Governance*, 6(2), 85–98.

McCombs, M. (2018). *Setting the Agenda: Mass Media and Public Opinion* (3rd ed.). Polity Press.

Nugroho, R. (2017). *Public Policy*. Elex Media Komputindo.

Sari, M., & Putra, R. (2020). Persepsi masyarakat terhadap kinerja DPRD dalam fungsi pengawasan. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 45–56.

Suharno. (2019). *Kebijakan Publik Kontemporer*. Ombak.

Widianingsih, I., & Morrell, E. (2019). Democratic governance and local parliament performance. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(2), 97–111.